

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN: MENYOAL RELEVANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER GENERASI MUDA

Jurisman Kadji

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: jurisman@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diperlukan karena memiliki nilai strategis dalam mendorong terbentuknya *national character building*. Karakter ini penting guna menciptakan sebuah kondisi tatanan kewarganegaraan yang baik. Relevansi Pendidikan kewarganegaraan terhadap negara adalah perihal kontribusi bidang pendidikan untuk membangun karakteristik-karakteristik dari seorang, agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui penelusuran kepustakaan, Tulisan ini berupaya Menggambarkan relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter Generasi Muda. Hasil penelitian mendeskripsikan tiga komponen utama yang penting dan kemudian menjadi intisari keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter. Yakni Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*Civic dispositions*). Untuk itu, perlu dilakukan upaya pembinaan karakter generasi muda di semua jenjang pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Selain itu, model pembelajaran yang dilakukan bukan hanya di dalam kelas. Melainkan perlu diperluas di luar komunitas sekolah dan kampus.

Kata kunci: Pendidikan, Kewarganegaraan, Relevansi, Karakter,

ABSTRACT

Citizenship Education (PKn) is needed because it has a strategic value in encouraging national character-building formation. This character is important in order to create a condition for a good citizenship order. The relevance of civic education to the state is about the contribution of the education sector to build the characteristics of a person so that he can carry out his responsibilities as a citizen. Through a literature search, this paper attempts to describe the relevance of Citizenship Education in shaping the character of the Young Generation. The results of the study describe three main components that are important and then become the essence of the linkage of civic education in character building, namely civic knowledge, civic skills and civic attitudes (civic dispositions). For this reason, efforts should be made to develop the character of the younger generation at all levels of education, Both formal and non-formal. In addition, the learning model is carried out not only in the classroom. Rather, it needs to be expanded beyond the school and campus community.

Keywords: Education, Citizenship, Relevance, Character

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu instrumen pembelajaran yang sangat penting untuk membina karakter generasi muda. PKn diperlukan karena memiliki nilai strategis dalam mendorong terbentuknya *national character building*. Karakter ini penting guna menciptakan sebuah kondisi tatanan kewarganegaraan yang baik. Tujuan pendidikan kewarganegaraan (PKn) secara umum adalah untuk membentuk warganya menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang melaksanakan hak dan kewajibannya serta mewujudkan budaya demokrasi dalam kehidupannya.¹

Relevansi Pendidikan kewarganegaraan terhadap negara adalah perihal kontribusi bidang pendidikan untuk membangun karakteristik-karakteristik dari seorang warga negara². Ini merupakan cara yang dilakukan untuk menyiapkan generasi muda agar menjadi warga negara yang nantinya memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.³

David Kerr dalam *citizenship education*: menguraikan bahwa orang-orang muda lah yang menjadi inti dari proses pendidikan kewargaan. Para generasi muda yang menjadi penerus bangsa ini dituntut untuk memahami hak dan tanggung jawabnya. Seperti Penjelasannya dalam *An international comparison*. Menurutnya *citizenship education* Sebagai *proces to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process*. Dalam proses pendidikan ini. PKn dipahami sebagai proses pembelajaran yang terimplementasi dalam keseharian setiap warganya. *Civic education* adalah *citizen education* yang model pembentukan karakternya dilakukan melalui bidang persekolahan.⁴

Lebih lanjut lagi, untuk membentuk karakter generasi muda menjadi warganegara yang baik. Maka beberapa prasyarat perlu diperhatikan dalam proses pendidikan kewarganegaraan. Menurut Birzea dalam *education for democratic* ada tiga indikator pokok yang bisa menjadi acuan dalam memahami konsep tentang warga negara. Yaitu: 1) *Knowledge and understanding about becoming informed citizens*, 2) *developing skills of inquiry and approach*, 3) *Developing skills of participation and responsible action*.⁵ Dalam pandangannya, Pengetahuan sebagai warga negara yang peduli sangat penting untuk selalu diterapkan. Setiap warga negara khususnya generasi muda harus didorong untuk memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan dan permasalahan di masyarakat. Hal ini tentunya didukung pula dengan keterampilan dan kemampuan generasi muda agar mampu

¹ Winarno, "Karakter Warga Negara Yang Baik Dan Cerdas," *PKn Progresif* 7, no. 1 (2012): 54–62.

² *Ibid.*

³ Damri and Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

⁵ Cesar Birzea, *Education For Democratic Citizenship " Education for Democ...* (Strasbourg, 2000).

terus bersaing dan berdaya guna. Kesemuanya dilakukan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Persoalan-persoalan di masyarakat seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah kepemudaan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh kementerian pemuda dan olahraga Setidaknya Terdapat sepuluh permasalahan dikalangan generasi muda Indonesia. Yakni; 1) maraknya kekerasan dikalangan generasi muda, 2) Sikap ketidakjujuran yang semakin mengakar dan membudaya. 3) Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. 4) Sikap curiga dan adanya kebencian antara satu dan yang lain. 5) Penggunaan bahasa Indonesia yang semakin memprihatinkan. 6) Penyimpangan perilaku dikalangan generasi muda 7); kecenderungan yang berlebihan terhadap budaya asing. 8) Melemahnya semangat kebangsaan, rasa Idealisme, patriotisme dan Nasionalisme. 9) Semakin meningkatnya sikap hedonisme dan pragmatisme, dan yang terakhir; 10) semakin acuh tak acuhnya generasi muda terhadap pedoman ajaran agama. Problem ini tentunya tidak bisa diabaikan. Upaya yang serius dan terencana perlu terus dilakukan.

Permasalahan kepemudaan yang terjadi seringkali dipicu oleh problem penerapan nilai-nilai dalam masyarakat. Generasi muda yang kurang dewasa dari hal psikologis, dan ekonomi juga kurang mandiri. Sering terorientasi dengan hal-hal yang tidak produktif dan terfragmentasi oleh sikap pragmatismenya. Beberapa penelitian menunjukkan masalah generasi muda ini disebabkan antara lain oleh kurang pastinya masa depan yang dihadapi, kurangnya lapangan pekerjaan, belum seimbangannya jumlah fasilitas pendidikan, banyaknya perkawinan dibawah umur, permasalahan pergaulan bebas, meningkatnya kenakalan remaja. dan lemahnya regulasi yang secara khusus mengatur tentang generasi muda.⁶

Lebih lanjut lagi, dari penulsuran yang ada terdapat problem yang serius dalam membangun karakter generasi muda Indonesia saat ini. Hal ini dapat diamati dari beberapa bidang kehidupan generasi muda. Misalnya pada bidang sosial dan budaya masyarakat. Perilaku mabuk-mabukan, bolos sekolah, kebut-kebutan, trek-trekan di jalan raya, masih marak terjadi. Disisi lain, Generasi muda dianggap cenderung mengabaikan nilai adat dan budaya yang ada. Hal ini terlihat dari cara berpakaian yang tidak sepatasnya dengan umur dan norma yang ada.⁷

Permasalahan lain yang juga patut menjadi perhatian yakni banyaknya generasi muda yang tidak memiliki pekerjaan, tentu bukan di perkotaan yang menuntut skill dan pengetahuan yang tinggi. Problem ini justru ditemukan pada wilayah pedesaan. Para pemuda ini memilih menganggur daripada melakukan kegiatan yang produktif. Hal ini kemudian membuat mereka seringkali dimanfaatkan hanya pada momentum tertentu. Seperti halnya pada momentum pesta politik seperti pemilihan umum (PEMILU). Keterlibatan generasi muda bukan sebagai subjek melainkan sebagai objek dari sasaran politik uang yang tentunya hanya untuk mendorong efek elektoral suara kandidat saja.

⁶ Yunisca Nurmalisa, *Pendidikan Generasi Muda* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017).

⁷ Z Muttaqin and W Wahyun, "Pemahaman Dan Implementasi Ideologi Pancasila Di Kalangan Generasi Muda," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian* (2019), <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/1139>.

Oleh sebab itu ikhtiar pendidikan kewarganegaraan (PKn) dianggap memiliki relevansi yang cukup besar dalam membangun kesadaran masyarakat. PKn memiliki peran penting dalam memperkenalkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Terutama pengembangan dan kemajuan karakter generasi muda. Beberapa nilai penting ini harus terus diupayakan karena menjadi penciri utama jati diri bangsa. Nilai-nilai tersebut antara lain yakni nilai religiusitas, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, disiplin, kerja keras, dan kreatif. Disamping pula nilai demokratis, cinta tanah air, dan peduli lingkungan sosial.⁸

Beberapa riset telah dilakukan mengenai peran PKn terhadap pembentukan karakter masyarakat. PKn bukan hanya memberikan perubahan secara kognitif saja tetapi juga ikut mempengaruhi pembentukan sikap generasi muda. Perubahan ini menjadi instrumen yang baik bagi Pemerintah untuk terus melakukan berbagai terobosan guna mendukung tujuan pendidikan ini. *Mainstream* pembelajaran Pkn yang telah berubah juga ikut mempengaruhi pembentukan karakter masyarakat. Pembelajaran Pkn yang selama ini bersifat sekolahan saja kini pun mulai dilakukan diluar sekolah. Organisasi sosial, politik, kepemudaan juga mendorong penguatan peran PKn sebagai bentuk pembinaan karakter generasi muda. Ini dikuatkan dengan kesadaran berdemokrasi. Melalui pembelajaran nilai-nilai demokrasi. Saat ini Paradigma Pkn mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pkn bukan lagi dari *education about democracy* namun kemudian menjadi *education for democracy*⁹

Oleh karena itu, dalam riset ini peneliti berusaha mengumpulkan beberapa temuan lapangan yang banyak mengulas tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter generasi muda berdasarkan prinsip penguatan nilai-nilai karakter dan upaya pembentukannya. Peneliti berupaya untuk Menggambarkan relevansi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Membentuk Karakter Generasi Muda Indonesia. Baik melalui kegiatan dalam pembelajaran di kelas maupun pembiasaan diluar kelas. Selain itu, peneliti berupaya untuk Mengetahui kendala-kendala maupun hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter generasi muda. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan (Pkn) yang tujuannya untuk mewujudkan *good citizen* pada akhirnya dapat terlaksana dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendapatkan informasi yang benar berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teoritis yang kuat terkait permasalahan yang diteliti. Cara ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan teknik pengumpulan data pustaka melalui membaca, mencatat dan mengolah bahan-bahan

⁸ T Izma and V Y Kesuma, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan, 17 (1), 84–92," 2019.

⁹ Laros Tuhuteru, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan Perilaku Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon," *PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5 (2020), <http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/702>.

hasil penelitian. Dalam hal ini, Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) maupun data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan, terkait kejadian, orang maupun peristiwa lainnya.¹⁰

Sumber utama dari penelitian ini adalah data-data riset kepustakaan yang menyangkut persoalan peran pendidikan kewarganegaraan. Peneliti berupaya melakukan Penelusuran referensi jurnal dan inventarisasi judul-judul yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan tetap mengedepankan kaidah-kaidah ilmiah. Karena sifat kepustakaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu maka perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan riset kepustakaan ini.

Peneliti memilih jurnal sebagai sumber Utama karena dinilai memiliki keakuratan dan unsur *novelty* yang *reliable* serta memadai. Disamping juga literatur ilmiah lain berupa buku-buku dan juga sumber-sumber berita online sebagai penunjang dalam penelitian ini. Utamanya terkait dengan pembentukan karakter generasi muda yang memiliki posisi penting dalam menentukan masa depan bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia.

Secara historis pendidikan kewarganegaraan (PKn) telah dikenal sejak lama pada masa penjajahan Belanda. Saat itu ilmu kewarganegaraan atau *civics* diperkenalkan dengan nama *Burgenkunde* yang diajarkan murni untuk kepentingan kolonial. Pelajaran yang diajarkan antara lain membahas tentang masalah masyarakat pribumi, pengaruh barat, sosial ekonomi, hukum, kebudayaan dan ketatanegaraan. Selain itu masalah masalah batasan kedaulatan raja dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah hindia belanda ikut menjadi pokok pembelajaran yang dikorelasikan dengan sejarah pemerintahan hindia belanda.¹¹

Pembelajaran yang sangat kental dengan nuansa kolonial ini menghasilkan Semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kesamaan nilai-nilai, tekad dan jiwa rela berkorban menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses pembentukan negara Indonesia. Lamanya hidup dalam penjajahan menyebabkan suasana perpecahan di nusantara. Ditambah lagi dengan tidak adanya persatuan dan kesatuan mengakibatkan kebodohan dan penderitaan.

Pada masa awal ini. Peran organisasi-organisasi pergerakan menjadi sangat strategis dalam membangun rasa kebangsaan. Hal ini ditandai dengan lahirnya gerakan budi utomo pada tanggal 20 mei tahun 1908 yang kemudian mendapatkan momentumnya pada peristiwa sumpah pemuda yang dipelopori oleh generasi muda pada tanggal 28 oktober 1928. Peristiwa ini menjadi sejarah penting dalam mendorong kebangkitan nasional yang pada akhirnya melahirkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

¹¹ Madiong Baso, Mustapa Zainuddin, and Andi Gunawan ratu Chakti, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018).

Pada masa awal kemerdekaan ini bangsa Indonesia kembali menghadapi ancaman serangan belanda. Agresi yang dilakukan pada tahun 1947 dan 1948 dilakukan atas respon kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Keinginan belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia dilakukan dengan cara membentuk negara federal. Tentu saja tujuan utamanya agar bangsa ini mudah dikuasai oleh belanda. Negara federal atau negara serikat merupakan bentuk negara yang terdiri dari negara-negara bagian. Bentuk negara seperti ini pada prakteknya tidak sesuai dengan semangat dan kehendak politik rakyat Indonesia. Meskipun sempat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD-RIS).

Namun tidak berumur panjang. Tuntutan kembali ke NKRI mendorong satu persatu negara bagian yang sebelumnya terpisah menggabungkan diri menjadi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Perjuangan keras yang telah dilakukan tidak serta merta mengantarkan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik. Pemberontakan dan perlawanan dari kelompok ideologi tertentu masih terus terjadi. Berakhirnya agresi militer belanda mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan ideologi kiri yang selama awal kemerdekaan berada dalam struktur pemerintahan tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Keadaan ini menjadi awal dari terjadinya pemberontakan PKI tepatnya pada tanggal 18 September 1948.¹²

Dalam catatan sejarah, sejak proklamasi kemerdekaan tercatat lebih dari delapan pemberontakan terjadi di berbagai belahan wilayah indonesia. Yaitu.1) pemberontakan madiun, 1948. 2) DI/TII kartosuwiryo 1949. 3) Republik Maluku Selatan (RMS). 4). Permesta di makassar-sulawesi utara pada tahun 1975. 5) PRRI di sumatera barat pada tahun 1958. 6) G30S/PKI pada tahun 1965. 7) OPM-Irian jaya, 1970-an. Dan 8) Gerakan Aceh Merdeka pimpinan Hasan Tiro, 1974.¹³ Peristiwa ini semakin mengingatkan kita, betapa perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang sudah dinikmati bukanlah perkara yang mudah dan tidak boleh diabaikan. Karena sebab akibatnya akan selalu terkait dengan kedaulatan negara.

Fase perubahan pendidikan kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan kewarganegaraan pada awalnya dimulai pada era pemerintahan soekarno yakni pada tahun 1957. Pada era ini PKn di Indonesia dikenal dengan sebutan *civics*. Pendidikan civics mendapatkan perhatiannya dan mulai diajarkan disekolah-sekolah pada tahun 1961 yang kemudian lambat laun berganti nama dengan sebutan kewarganegaraan di tahun 1968.¹⁴ Pada kurikulum 1968 dan 1969 istilah *civics* dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar-pakai (*Interchangeably*). Pada kurikulum SD digunakan istilah kewarganegaraan dan kurikulum SMP digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang berisi tentang

¹² Irvan Tasnuri and Muhammad Rijal Fadli, "Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)," *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 5, no. 2 (2019).

¹³ Anhar Gonggong, "Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia: Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006," *Teras law review: Jurnal hukum humaniter dan Ham* (2006).

¹⁴ Baso, Zainuddin, and Chakti, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*.

sejarah indonesia dan kontitusi negara. Sementara untuk jenjang SMA 1968 disebut dengan pelajaran kewargaan negara yang muatan materinya berkenaan dengan UUD 1945.

Selanjutnya pada tahun 1975, Pendidikan kewargaan negara di ubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang pokok ajarannya berisi materi pancasila sebagaimana diuraikan dalam pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4). Mata pelajaran ini terus dipertahankan didalam istilah dan muatan materinya sampai dengan diberlakukannya kurikulum 1984. Pada tahun ini kurikulum yang digunakan hanyalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yakni kurikulum 1975 yang berorientasi pada muatan nilai-nilai pancasila. Pada tahun 1994, kurikulum pendidikan dasar dan menengah memperkenalkan mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn). Yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang mengartikulasikan sila-sila pancasila melalui penjabaran nilai disetiap jenjang pendidikan juga caturwulan pada setiap kelasnya.

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, maka dilaksanakanlah kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004 dengan perubahan perubahan pendidikan kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan. Meski kemudian berubah lagi ditahun 2006 kembali menjadi PKn namun secara substansi tidak mengalami perubahan yang berarti. Perubahan terjadi hanya pada kewenangannya pada satuan pendidikan.¹⁵

Dinamika perubahan PKn bukan hanya disandarkan pada kewajiban konstitusional semata. Namun dalam perkembangannya juga mempertimbangkan tuntutan publik dan perkembangan zaman. Misalnya saja tentang kecenderungan masa depan bangsa yang menjadi bagian dari komunitas internasional meliputi isu Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi dan juga lingkungan hidup. Hal ini kemudian yang mendasari beberapa perubahan Pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2012 dan 2013. Terkait dengan isi materi yang diajarkan pada jenjang pendidikan Beberapa perubahan dalam perkembangan PKn diuraikan sebagai berikut:

NO	TAHUN	NAMA	Isi Materi
1	1946	Pengetahuan Umum	Pemerintahan Indonesia
2	1957	Civics (Tata Negara dan Tata Hukum	Konsepsi kewarganegaraan khususnya syarat warga negara
3	1962	Civic	Pemerintahan Indonesia sesuai dengan UUD 1945

¹⁵ Desy Nurhidayah, Eusi Siti Aisyah, and Janjan Nurjannah, "PKn Dalam Kurikulum 2013," *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)* 10, no. 1 (2020): 1–13.

IRFANI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

P-ISSN 1907-0969 E-ISSN 2442-8272

Volume 18 Nomor 2 November 2022

Halaman 97-113

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

4	1968	Civics (dengan Nama dan Materi berbeda tiap jenjang)	Jenjang SD yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, Geografi Indonesia, jenjang Diatasnya tentang Pengetahuan Pemerintahan dan kewarganegaraan lainnya
5	1975	PMP	Materi Pancasila sesuai dengan P4
6	1984	PMP	Orientasi pada Value Inculcation dengan Nilai-nilai Pancasila
7	1994	PPKN	artikulasi Nilai dari Sila-sila Pancasila untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan konsep Nilai dalam P4
8	2003	PKn (Pancasila masuk di dalamnya)	Sesuai dengan nilai-nilai universal pancasila dan penghormatan terhadap Prinsip Demokrasi dan HAM Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003
9	2004	Kewarganegaraan	Berdasarkan Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK). Dengan Mengerjakan Tugas-tugas yang diberikan guru
10	2006	Pendidikan kewarganegaraan (PKn)	Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) guru berperan aktif
11	2012	PKn (UU pendidikan tinggi)	Pendidikan Untuk perguruan tinggi Dipisahkan dengan pendidikan pancasila sesuai dengan UU No 12 tahun 2012 (PP No. 24 tahun 2016) proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua pelajaran di jenjang SMP/SMS/SMK
12	2013	PPKN (kurikulum 2013) Tematik terpadu	

Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pada Generasi muda

Pelaksanaan Pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada intinya merupakan proses penyiapan dan pembentukan generasi muda untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Proses penyiapan ini dilakukan dengan kegiatan pembelajaran yang mendorong setiap generasi muda agar dapat memiliki pengetahuan dan

kecakapan dan juga nilai-nilai yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Generasi muda atau pemuda adalah satu identitas yang potensial dalam menentukan cita-cita perjuangan bangsa. Secara terminologi, Pemuda merupakan warga negara Indonesia yang telah memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan dengan rentang usia 16 tahun sampai 30 tahun. Selain memikul beban dan tanggung jawab strategis dalam perjuangan masa depan bangsa. Pemuda dihadapkan pada persoalan nilai-nilai ideologis dan kultural yang telah ada di masyarakat. Terutama problem nilai antara generasi muda dan tua yang dianggap kurang dewasa secara psikologis dan juga mandiri dalam hal ekonomi.¹⁶

Generasi muda dalam proses perkembangannya dianggap mudah difragmentasi dan rentan terpecah belah oleh isu-isu sederhana di masyarakat. Seperti; Tawuran, perkelahian antar kelompok, kecanduan narkoba, pergaulan bebas hingga frustrasi yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap orang tua.

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengakibatkan memudarnya nilai-nilai luhur dan moral bangsa yang selama ini membentuk jatidiri bangsa. Oleh sebab itu keberadaan pendidikan kewarganegaraan diyakini memiliki relevansi strategis dalam membentuk karakter generasi muda menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Melalui pembelajaran yang difokuskan pada pembentukan diri generasi muda. Maka kecenderungan terhadap ancaman rusaknya tatanan sosial akan bisa diminimalisir. Hingga akhirnya para generasi muda dapat tampil sebagai pribadi yang memiliki nilai karakter yang baik dan cerdas.

Nilai Pendidikan karakter dalam Pembelajaran PKn

Pendidikan memiliki peranan besar dalam mempersiapkan karakter manusia menghadapi tantangan global. Tantangan ini datang dalam wujud yang beragam. Baik secara Ideologi, ekonomi, politik dan juga sosial budaya. Sebagai sebuah negara yang memiliki kedaulatannya. Indonesia dituntut untuk mampu memfiltrasi berbagai macam tantangan yang datang dari luar. Pengaruh ideologi asing dan tekanan ekonomi dunia. Mau tidak mau memaksa negara ini untuk selalu merespon tuntutan perkembangan dunia dengan bijak. Tanpa abai dengan identitas dan jati dirinya sebagai sebuah bangsa. Nilai-nilai yang selama ini ada dan menjadi karakteristik bangsa harus terus diupayakan dan dipertahankan. Upaya ini dapat dilakukan melalui penanaman pendidikan karakter bagi para generasi muda. Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial adalah orang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik.¹⁷

Pemahaman ini setidaknya menjadi rujukan bagaimana pandangan masyarakat Indonesia mengenai karakter yang bersumber dari sejumlah nilai kebajikan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 18 nilai yang hendaknya bisa diidentifikasi, dirasakan dan dilakukan sebagai karakter bangsa. Nilai-nilai ini bersumber dari landasan

¹⁶ Yunisca Nurmalisa, *Pendidikan Generasi Muda* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017).

¹⁷ Mohamad Fadhilah Zein, *Adab Sebelum Ilmu; Membangun Indonesia Dengan Pendidikan Dan Pembangunan Karakter Bangsa* (Jakarta: MFZ Digital Publishing, 2020).

filosofis pancasila sebagai jati diri bangsa yakni; Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli, lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.

Dalam kaitanya dengan perwujudan karakteristik generasi muda. Pendidikan karakter adalah salah satu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil dalam kehidupan siswa atau generasi muda.¹⁸ Thomas Lickona dalam buku *educating for character* menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sengaja yang dilakukan untuk menolong orang agar memahami, peduli akan, dan bertindak atas dasar nilai-nilai etis.¹⁹

Hal ini berarti, generasi muda harus mampu menilai apa yang benar, peduli tentang apa yang benar, serta melakukan apa yang diyakininya benar. Oleh sebab itu, peran PKn sebagai upaya pendidikan karakter generasi muda menjadi sangat strategis dan penting untuk selalu diupayakan. Dalam pendidikan karakter, peranan komunitas sekolah menjadi penting dalam mengidentifikasi nilai-nilai inti dan meneguhkannya menjadi nilai bersama yang dipraktekan dalam kehidupan siswa. Konsensus mesti dicapai untuk mengembangkan visi bersama menyelami dan memahami karakter yang harus dipelihara. Beberapa praktek pembelajaran PKn yang dapat dilakukan yakni melalui penanaman nilai dan peningkatan rasa nasionalisme, pemahaman sikap dan tingkah laku yang berdasarkan pancasila dan penguatan nilai budaya bangsa.²⁰

Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembentukan Karakter

Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada hakikatnya adalah program pendidikan yang dilakukan untuk menumbuhkan pribadi yang berkarakter. Program ini dilakukan melalui upaya sadar dan sistematis guna menumbuhkan rasa cinta dan sikap patriotisme dalam diri generasi muda.²¹ *National council for the social Studies (NCSS)* menguraikan beberapa tujuan dari dilaksanakannya pendidikan kewarganegaraan ini antara lain:

1. Agar setiap warga negara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk memecahkan masalah.
2. Agar warga negara memiliki kesadaran tentang adanya pengaruh sains dan teknologi bagi peradaban. Serta mampu digunakan untuk memperbaiki nilai kehidupan.
3. Warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif
4. Warga negara memiliki kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan nilai-nilai kehidupan yang efektif

¹⁸ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila* (Jakarta: Mizan, 2018).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ T Izma and V Y Kesuma, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa," *Wahana Didaktika* 17 (2019).

²¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*.

5. Menyadari bahwa mereka hidup dalam dunia yang terus berkembang. Dan membutuhkan kesediaan untuk menerima gagasan dan tata cara hidup yang baru
6. Warga negara dapat berperan serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat. Para pakar dan spesialis.
7. Warga negara memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu serta hak orang yang dijamin konstitusi.
8. Warga negara memiliki kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain. Serta dukungan untuk perdamaian serta kerjasama
9. Mampu memanfaatkan seni yang kreatif untuk meningkatkan perasaan terhadap pengalaman manusia yang universal.
10. Mempersiapkan warga negara yang mampu menentukan pilihan yang tepat diantara berbagai macam alternatif yang terdapat dalam masyarakat.

Kesemua tujuan pendidikan kewarganegaraan diatas secara konseptual diarahkan untuk mencapai tujuan akhir (*learning outcomes*) yakni terwujudnya kebajikan dan keadaban kewarganegaraan dalam diri setiap warga negara Indonesia. Namun demikian seiring dengan proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Sejak Era reformasi, rasa kebangsaan yang mempersatukan semangat perbedaan seolah kian runtuh. Perkembangan kemajuan iptek dan informasi. Ikut pula mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi antara manusia.

Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa, globalisasi yang terjadi mendorong semakin terpisahnya ruang interaksi sosial dikalangan generasi muda. Derasnya informasi yang masuk dengan muatan ideologi, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya membuat permasalahan baru bagi pembentukan karakter generasi muda. Bahkan bisa menjadi ancaman yang serius bila tidak mampu direspon dengan baik oleh pemerintah.

Pada posisi ini kedudukan pendidikan kewarganegaraan (PKn) menjadi sangat strategis dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Setidaknya ada tiga komponen penting diuraikan oleh *Margaret Stimmann Branson* dalam *the role of civic education* dalam menjelaskan kedudukan ini.²² Tiga komponen ini yang kemudian menjadi intisari relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter. Yakni; 1) Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warga negara ketahui. 2) Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), yakni keterampilan apa yang harus dimiliki oleh warga negara. 3) Sikap kewarganegaraan (*Civic dispositions*), yang terkait karakter privat yang perlu dipelihara dan dikembangkan.

²² *Ibid.*

1. Pengetahuan kewarganegaraan Generasi muda (*Civic Knowledge*)

Pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan sangatlah penting dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn) setiap generasi muda dibimbing untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks pembangunan negara hukum yang berlaku di Indonesia. PKn menjadi salah satu syarat dasar dalam pemerintahan yang demokratis.²³

Kemunculan PKn sendiri merupakan respon terhadap perjalanan panjang Bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan ketahanan nasional yang penuh dengan dinamika. Melalui pendidikan kewarganegaraan (PKn) Generasi muda diarahkan untuk belajar dan memahami proses pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi negara. Disisi lain Pkn juga sebagai pendidikan politik yang diarahkan untuk mendorong peranan warga negara dalam kehidupan bernegara sesuai dengan ketentuan pancasila dan UUD 1945.

Beberapa pengetahuan seperti pendidikan karakter kebangsaan, demokrasi, pendidikan bela negara, Multikultural, lingkungan hidup, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan politik dan pendidikan hukum dan HAM. Menjadi Pokok pengetahuan yang diajarkan dalam pembelajaran PKn²⁴ Dengan bekal pengetahuan ini generasi muda diharapkan dapat menjadi warga negara yang percaya diri (*civic confidence*).²⁵

Sasaran pendidikan kewarganegaraan sendiri diarahkan pada pembinaan karakter generasi muda. Di semua jenjang pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Dijelaskan posisi penting dari PKn dalam kurikulum nasional. Setiap kurikulum pendidikan wajib mencantumkan pendidikan kewarganegaraan mulai dari tingkatan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.²⁶

Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang sampai saat ini masih menjadi dasar utama proses pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum pendidikan ini dilaksanakan melalui kegiatan. Kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.²⁷ Kesemua strategi Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan dimaksudkan untuk dapat membentuk sikap yang positif bagi para generasi muda guna mewujudkan nilai-nilai karakter sebagai warga negara. Sebagaimana tujuan utama pelaksanaan pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi.*

²⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

²⁷ Presiden Republik Indonesia, "UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi," 2012.

Hasil riset menunjukkan adanya ancaman perubahan tatanan nilai kehidupan yang mulai terjadi menyebabkan penurunan kualitas karakter.²⁸ Hal ini tentu menjadi perhatian dan kekhawatiran bersama. Penurunan kualitas ini menyebabkan publik bertanya sejauh mana relevansinya Pkn dalam membentuk dan membangun karakter warga negara. Salah satunya adalah Esensi Pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan setiap warga negara untuk tidak mudah terombang-ambing oleh adanya pengaruh budaya asing. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, menjelaskan begitu pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan karakter sikap dan perilaku khususnya generasi muda. Dalam menangkal pengaruh dan ancaman paham radikalisme.²⁹

Temuan riset ini Mengkonfirmasi bagaimana peran Pendidikan kewarganegaraan mampu menjadi instrumen utama yang digunakan dalam upaya deradikalisasi generasi muda. Ancaman ekstrimisme dan politik identitas telah tumbuh dan berkembang menjadi tantangan bagi kemajemukan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.³⁰ Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan dalam prosesnya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa SMK di Purwokerto. Hasil riset menunjukkan melalui pembelajaran PKN para siswa mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman Hukum yang baik. Komponen pembelajaran yang bervariasi menjadi daya dukung tersendiri dalam menanamkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum.³¹

2. Kemampuan dan keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Civic skills merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan dan dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan ini meliputi ketrampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan partisipasi (*Participation skills*).³² Dalam penerapan *civic skills* setiap warga negara dituntut untuk mengenal kondisi lingkungannya. Baik itu dimensi lokalitas budaya dan problem multikulturalisme lainnya. Sebagai warga negara, generasi muda perlu mengenal kehidupan masyarakat dengan segala isu-isu sosial yang ada. Hal ini erat kaitannya dengan karakteristik warga negara dan relevansinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

²⁸ T Saputra, K Komalasari, and P Bestari, "Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Living Values Education Dalam Membentuk Nilai-Nilai Karakter Siswa," ... *Nasional Kewarganegaraan* (2019), <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/article/view/1476>.

²⁹ Rizal Fahmi et al., "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Deradikalisasi Generasi Muda," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 33–42.

³⁰ *Ibid.*

³¹ R Destikasari, "Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa (Studi Analisis Deskriptif Di Smk Wiworotomo Purwokerto)" (repository.ump.ac.id, 2016), <http://repository.ump.ac.id/5041/>.

³² Reh Bungana Beru Perangin-angin, "Pengembangan Pembelajaran PPKn Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kompetensi Civic Skill Mahasiswa Jurusan PPKn UNIMED," *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 151.

Keberhasilan Pendidikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dari setiap individu. Pengaruh ini akan menghasilkan sebuah perubahan yang tetap didalam kebiasaan tingkah lakunya serta pikiran, dan perasaannya.³³ Pengembangan intelektual yang dilakukan secara sungguh akan memberi kontribusi penting dalam mempersiapkan masa depan yang baik. Khususnya generasi muda dalam membentuk *civic skills*.

Dari hasil riset yang dilakukan, ditemukan bahwa PKn yang selama ini diajarkan memiliki beberapa kendala dalam proses penerapannya. Generasi muda dalam hal ini para siswa dan mahasiswa yang telah belajar Mengenai PKn hanya memahami materinya (*Civic Knowledge*). Sedangkan keterampilan atau *civic skills* dirasakan masih kurang bahkan tidak terlatih sedikit pun. Pengintegrasian kearifan lokal melalui unsur budaya menjadi penting guna meningkatkan kompetensi dan ketrampilannya.³⁴

Hal yang sama pula diuraikan dalam riset Laros Tuhuteru Mengenai Peran PKn dalam pembinaan karakter dan perilaku generasi muda di Ambon. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pembinaan karakter berdasarkan budaya lokal. Nilai budaya seperti masohi makan patita, gerakan jujaro dan ngungare, ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa daging dan acara bambu gila. Menjadi nilai *civic skills* yang Dapat mendorong pembentukan karakter generasi muda yang peduli dan saling menghargai perbedaan satusama lain³⁵

Kemampuan dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Apalagi negara yang multikultural seperti Indonesia. Peran dan partisipasi warga negara yang baik tentunya dapat menjadi pelindung dan benteng yang ampuh dalam menghadapi segala macam ancaman yang datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Nilai-nilai, komitmen dan sikap kewarganegaraan yang berkarakter pancasila (*Civic Disposition*)

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan pembelajaran pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter dan pembentukan sikap perilaku yang baik bagi setiap warga negara. Karakter dalam konteks ini adalah pembentukan karakter generasi muda yang sesuai dengan nilai pancasila dan nilai-nilai sifat positif lainnya dan menjadi sumber dari jati diri bangsa Indonesia.³⁶ Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial adalah orang yang dalam kesehariannya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik.³⁷ Karakter merupakan

³³ Damri and Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*.

³⁴ Perangin-angin, "Pengembangan Pembelajaran PPKn Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kompetensi Civic Skill Mahasiswa Jurusan PPKn UNIMED."

³⁵ Tuhuteru, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan Perilaku Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon."

³⁶ Fahmi et al., "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Deradikalisasi Generasi Muda."

³⁷ Zein, *Adab Sebelum Ilmu; Membangun Indonesia Dengan Pendidikan Dan Pembangunan Karakter Bangsa*.

sifat kejiwaan seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain dan berdampak pada keseharian dari orang tersebut.

Nilai-nilai karakter yang diimplementasikan dalam PKn meliputi dua nilai karakter. Yakni nilai karakter pokok dan nilai Karakter Utama PKn. Nilai karakter yang pertama yaitu menciptakan generasi yang religius, jujur, cerdas, tangguh, demokratis, dan peduli. Sedangkan nilai karakter yang kedua yaitu Nasionalis, patuh terhadap aturan, menghargai keberagaman, memahami Hak dan Kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif dan mandiri.³⁸ Oleh karena itu, dalam penerapannya. Penilaian Pembelajaran PKn tidak bisa hanya dilihat dari aspek kognitif semata, namun harus dilihat pula dari aspek psikomotor dan afektifnya. Aspek ini melibatkan keterlibatan dan partisipasi aktif setiap peserta didik, khususnya generasi muda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kesimpulan secara umum mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dan relevansinya terhadap internalisasi nilai-nilai Karakter Pancasila pada generasi muda. Penelusuran yang dilakukan menunjukkan adanya perubahan sikap yang cukup baik dalam kegiatan belajar yang dilakukan misalnya dalam membentuk karakter bertanggung jawab dan patuh terhadap aturan. Pada contoh kasus pembelajaran PKn. setiap siswa diberi hukuman yang disepakati bersama apabila ada yang tidak berpartisipasi dalam pembelajaran kelompok dan tugas-tugas yang diberikan.

Selain itu pembelajaran yang dilakukan bukan hanya di dalam kelas. Beberapa kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dalam mendukung pengembangan karakter siswa atau generasi muda. Seperti halnya kegiatan kepramukaan. Para siswa dibiasakan untuk disiplin dan juga patuh terhadap aturan yang ada. Penanaman nilai-nilai agama juga selalu diajarkan. Setiap siswa diajarkan untuk rajin beribadah sesuai kepercayaannya dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Hal ini dilakukan agar timbul rasa peduli dan toleransi terhadap temannya.

Disamping kegiatan pembinaan karakter yang dilakukan di sekolah sebagai aktualisasi budaya. Pembinaan karakter ini dilakukan juga melalui kegiatan-kegiatan keseharian di rumah dan dimasyarakat. Generasi muda diarahkan melalui kegiatan bersama dalam suasana gotong royong dan kekeluargaan. Para generasi muda diajarkan untuk mencintai sesama dan juga mencintai lingkungannya.³⁹

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah program pendidikan yang dilaksanakan untuk membentuk pribadi yang berkarakter. Program ini dilakukan melalui upaya sadar dan terencana guna menumbuhkan sikap kebangsaan dan keindonesiaan dalam diri generasi muda. Setiap generasi yang hadir sebagai manusia baru dituntut untuk memiliki pengetahuan nilai, sikap dan keterampilan sebagai warga negara yang berkarakter baik dan cerdas (*smart and good citizen*).

³⁸ Budi Juliardi, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 2 (2015): 119–126.

³⁹ Tuhuteru, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan Perilaku Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon."

Pembentukan karakter ini memang tidak mudah. Ancaman perubahan tatanan nilai kehidupan yang mulai terjadi menyebabkan penurunan kualitas karakter dari generasi muda. Untuk itu, peran para pendidik sebagai ujung tombak menjadi sangat penting. Para pendidik harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai bukan hanya di dalam kelas juga di luar kelas. Generasi muda harus bisa menemukan teladan yang baik dalam semua aspek kehidupan.

Dinamika tatanan nilai masyarakat dan perubahan sistem politik pemerintahan menjadi faktor penentu dalam perkembangan dan penguatan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan sistematis melalui PKn dalam membentuk kualitas karakter generasi muda. Karakter pokok seperti religius, jujur, demokratis, dan sikap peduli harus terus dibicarakan dan ditanamkan secara sengaja. Disamping itu, nilai Karakter utama PKn yang Nasionalis, memiliki integritas, toleransi dan Gotong royong juga perlu terus diupayakan.

Perlu dilakukan pembinaan karakter generasi muda pada semua jenjang pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Model pembelajaran yang dilakukan bukan hanya di dalam kelas. Namun juga dilakukan diluar lingkungan kelas melalui kegiatan-kegiatan keseharian dirumah dan dimasyarakat. Pembelajaran PKn hendaknya diperluas di luar komunitas sekolah dan kampus. Komunitas–komunitas di luar sekolah (*stakeholders*) yang terkait harus membantu lingkungan akademik ini untuk memahami nilai-nilai karakteristik apa yang dianggap penting dan *urgent* mendapat perhatian publik. Lalu kemudian mendukung program-programnya. Dengan begitu Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) akan memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk karakter generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfisyah, Sapriya, Lumban Arofah. "Civic Education Di Pesantren Sebagai Basis Pembentukan Kesadaran Kebangsaan." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 4 (2021).
- Baso, Madiung, Mustapa Zainuddin, and Andi Gunawan ratu Chakti. *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018.
- Birzea, Cesar. *Education For Democratic Citizenship " Education for Democ...* Strasbourg, 2000.
- Damri, and Fauzi Eka Putra. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Destikasari, R. "Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa (Studi Analisis Deskriptif Di Smk Wiworotomo Purwokerto." repository.ump.ac.id, 2016. <http://repository.ump.ac.id/5041/>.
- Fahmi, Rizal, Aisha Nadya, Nursanda Rizki Adhari, and Zindan Baynal hubi. "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Deradikalisasi Generasi Muda." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 33–42.

IRFANI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

P-ISSN 1907-0969 E-ISSN 2442-8272

Volume 18 Nomor 2 November 2022

Halaman 97-113

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

- Gonggong, Anhar. "Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia: Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006." *Teras law review: Jurnal hukum humaniter dan Ham* (2006).
- Izma, T, and V Y Kesuma. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan, 17 (1), 84–92," 2019.
- Juliardi, Budi. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika 2* (2015): 119–126.
- Latif, Yudi. *Wawasan Pancasila*. Jakarta: Mizan, 2018.
- Muttaqin, Z, and W Wahyun. "Pemahaman Dan Implementasi Ideologi Pancasila Di Kalangan Generasi Muda." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian* (2019). <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/1139>.
- Nurmalisa, Yunisca. *Pendidikan Generasi Muda*. Yogyakarta: Media Akademi, 2017.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru. "Pengembangan Pembelajaran PPKn Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kompetensi Civic Skill Mahasiswa Jurusan PPKn UNIMED." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 151.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.
- . "UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi," 2012.
- Saputra, T, K Komalasari, and P Bestari. "Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Living Values Education Dalam Membentuk Nilai-Nilai Karakter Siswa." ... *Nasional Kewarganegaraan* (2019). <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/article/view/1476>.
- Tasnuri, Irvan, and Muhammad Rijal Fadli. "Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)." *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 5, no. 2 (2019).
- Tuhuteru, Laros. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan Perilaku Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon." *PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5 (2020). <http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/702>.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi. Edisi Keempat*. Jakarta: Sinar grafika, 2020.
- . *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Zein, Mohamad Fadhilah. *Adab Sebelum Ilmu; Membangun Indonesia Dengan Pendidikan Dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: MFZ Digital Publishing, 2020.